



## Bulan Bahasa, Momentum Menjaga Eksistensi Bahasa Indonesia

sebagai Sumpah Pemuda. Poin ketiga pada ikrar tersebut adalah "Kami Putra dan Putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia".

Karena ikrar ini pulalah bulan Oktober dipilih sebagai bulan bahasa. Perkembangan bahasa Indonesia pun banyak mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman. Perubahan sosial masyarakat dan perkembangan teknologi pun turut mempengaruhi perkembangan bahasa Indonesia. Bahkan tak jarang banyak yang tidak mengetahui bahwa Ejaan bahasa Indonesia telah mengalami 7 kali perubahan. Mulai dari ejaan Van Ophuijsen, Ejaan Republik atau ejaan Soewandi, ejaan Pembaharuan, Ejaan Melindo, Ejaan LBK (Lembaga Bahasa dan Kesusastraan), Ejaan yang Disempurnakan (EYD) dan Ejaan Bahasa Indonesia (EBI) yang tertuang pada

Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Meskipun mengalami perubahan tidak semua ejaan pada akhirnya bisa diterapkan, tentu saja banyak faktor yang mempengaruhinya. Akan tetapi, setelah ada perubahan, EYD yang selama ini masih dikenal masyarakat luas telah digantikan oleh EBI yang secara struktur Bahasa tidak banyak mengalami perubahan.

Penggunaan Bahasa Indonesia di tengah era global yang banjir akan informasi tentu saja menjadikan generasi masa kini lebih terbiasa dengan istilah-istilah asing. Apalagi istilah dalam perangkat teknologi komunikasi yang lebih sering menggunakan Bahasa asing (Inggris) karena lebih mudah dipahami. Hal ini boleh jadi karena Bahasa

Indonesia sendiri belum memiliki padanan kata yang pas untuk beberapa istilah dan butuh waktu untuk mencarikan padanan kata yang cocok, sehingga masyarakat lebih dulu menggunakan istilah asing. Setelah mendapat padanan kata yang pas maka Kemendikbud lewat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (BPPB) mengumumkan padanan kata untuk istilah yang baru dan dirilis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Selain itu, untuk memudahkan penyerapan padanan kata, KBBI Daring juga menyediakan wadah bagi warganet yang akan merekomendasikan kata atau istilah asing yang belum ada padanan katanya dalam Bahasa Indonesia.

**Bulan Bahasa sebagai Momentum**  
Di Bulan Bahasa ini, maka sudah seharusnya sebagai

rakyat Indonesia menjadikan momentum sebagai titik balik kesadaran masing-masing bahwa 75 tahun Indonesia merdeka tentu saja tidak lepas dari peran Bahasa Indonesia sebagai pemersatu bangsa. Indonesia yang terdiri dari beragam suku, budaya, dan Bahasa daerah namun dapat disatukan dengan Bahasa persatuan yaitu Bahasa Indonesia. Oleh karena itu, persoalan memelihara Bahasa Indonesia bukan saja pekerjaan para penggiat Bahasa, akademisi, pemerhati Bahasa dan orang-orang yang fokus terhadap pemeliharaan Bahasa Indonesia saja, namun tugas semua masyarakat Indonesia. Banyak hal yang dapat dilakukan, dengan membiasakan menggunakan Bahasa Indonesia di ruang publik, baik secara nyata maupun virtual, mengampayekan istilah-istilah baru yang diserap dalam Bahasa



Indonesia, memiliki rasa kebanggaan menggunakan bahasa Indonesia dalam berbagai kesempatan agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat Indonesia yang beragam budaya dan bahasa daerah.

Selain itu, hindari menggunakan Bahasa asing secara berlebihan kecuali jika dituntut untuk berbahasa asing. Sekali lagi, penekanannya adalah pembiasaan, karena keberhasilan pelestarian Bahasa Indonesia justru tidak datang dari pendidikan formal melainkan dari kebiasaan di lingkungan masyarakat dan keluarga. Dengan demikian, eksistensi Bahasa Indonesia yang mulai tergerus oleh bahasa slang dan asing dapat tetap bertahan.\*\*\*

## 12,4 JUTA PEKERJA TERIMA BSU

# 56.000 Pengaduan Belum Ditindaklanjuti

**JAKARTA (KR)** - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyatakan, Pemerintah sudah menyalurkan dana Rp 14,88 triliun untuk 12,4 juta pekerja penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU). Terkait hal ini, Deputy Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan menyatakan, sampai 29 September 2020 ada 167.314 pengaduan untuk Kemenaker terkait BSU.

Dari jumlah pengaduan itu, menurutnya, tinggal 56.000 pengaduan yang belum ditindaklanjuti. "Jika kita lihat 55 persen pengaduan karena tidak terima, jangan-jangan mereka ini belum terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan atau karena ini disalurkan perbatch harus sabar, sedangkan 15 persen baru bertanya persyaratannya apa untuk mendapat subsidi upah," kata Pahala di Jakarta, Jumat (2/10).

Ia mengatakan itu saat konferensi pers bersama Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, Menaker Ida Fauziyah dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) Agus Susanto menge-

nai tindaklanjut rekomendasi KPK terhadap Program BSU. Pahala menyebutkan, KPK merekomendasikan tiga hal dalam program tersebut.

Dijelaskan, KPK melihat dalam program seperti ini data harus valid, supaya data harus berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) supaya terjamin orangnya ada. "Selain itu, pada saat yang sama bisa dikroscek ke data lain seperti BPJS, Kartu Pra Kerja atau data yang terkait Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan terakhir kroscek ke Ditjen Pajak," tutur Pahala.

Menurutnya, hal itu penting karena kriteria penerima BSU adalah pekerja de-

ngan gaji di bawah Rp 5 juta. "Padahal kita tahu perusahaan yang memberikan data juga melaporkan PPH 21 setiap pegawai yang punya penghasilan. Kami ingin mengamankan saja karena basis program ini NIK jadi dicek ke pajak," katanya.

Dikatakan, syarat penerima BSU adalah WNI yang dibuktikan kepemilikan NIK, terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan aktif membayar iuran sampai Juni 2020, mendapat gaji/upah di bawah Rp 5 juta serta memiliki rekening bank aktif.

Ia Fauziyah mengatakan, Pemerintah sudah menyalurkan dana Rp 14,88 triliun untuk 12,4 juta pekerja penerima BSU. Data terakhir yang diberikan BP Jamsostek dari 15,7 juta pekerja ternyata jadi 12,48 juta pekerja, jadi ada selisih dari target awal karena sudah dilakukan validasi oleh BP Jamsostek. Bantuan diberikan dalam bentuk uang Rp 600.000 perbulan selama empat bulan yaitu Agustus-Desember 2020. **(Full)-f**

## HADAPI ADAPTASI KEBIASAAN BARU SESUAI KEMAMPUAN

# Ponpes di DIY Jangan Gegabah Datangkan Santri

**YOGYA (KR)** - Munculnya kasus santri pondok pesantren (ponpes) di DIY yang terpapar virus Corona menimbulkan guncangan tersendiri. Sebab institusi pendidikan, salah satunya ponpes termasuk yang paling terdampak dan rawan terjadinya pandemi Covid-19. Kasus penyebaran Covid-19 di salah satu ponpes di Sleman belum lama ini seharusnya menjadi pembelajaran bersama semua pihak agar lebih waspada dan berhati-hati. Pihak ponpes di DIY sendiri menyimpulkan tidak bisa gegabah mendatangkan santri ke pesantren dalam menghadapi pandemi Covid-19 tersebut.



KH Fairuzi Afiq Dalhar

"Kami telah mendapatkan izin menyelenggarakan pembelajaran tatap muka kepada Gugus Tugas Penanganan Covid-19 DIY dan arahan dari Gubernur DIY. Kami pun sudah memastikan kesiapan ponpes yang luar biasa guna membuka pembelajaran tatap muka bersama Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) DIY dengan melakukan tinjauan langsung sebelumnya. Dari 230-an ponpes di DIY, didapatkan 30 ponpes yang layak dan telah mempunyai Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Pesantren," ujar Ketua Rabithah Ma'ahidil Islamiyah (RMI) DIY KH Fairuzi Afiq Dalhar dalam Editorial KR dipandu Wapemred KR Ahmad Luthfie di channel Youtube Kedaulatan Rakyat TV.

Pengasuh Ponpes Nurussalam Putri Al-Munawwir Krapyak yang disapa Gus Uzi ini

menyampaikan sebanyak 30 ponpes di DIY yang dinyatakan siap dan layak menyelenggarakan pembelajaran luar jaringan (luring) dinilai telah memenuhi sarana dan prasarana atau fasilitas sesuai protokol kesehatan pencegahan Covid-19 yang dipersyaratkan di lingkungan ponpes. Antara lain mempunyai tempat karantina tersendiri yang lebar, menyediakan tempat cuci tangan, mempunyai ruang pemeriksaan, memisahkan pintu masuk dan keluar hingga penyesuaian kapasitas kamar santri yang bervariasi.

Sementara itu, Dinas Kesehatan Sleman masih melakukan tracing terhadap kasus positif Covid-19 di lingkungan pondok pesantren (ponpes). Hingga Jumat (2/10) dari hasil tracing ada penambahan 14 kasus baru yang dinyatakan positif Covid-19. Hingga saat ini jumlah kasus positif di lingkungan ponpes sebanyak 62 kasus. Jumlah tersebut merupakan 55 dari ponpes di wilayah Ngaglik, 1 kasus di ponpes wilayah Ngaglik lain, serta 6 kasus di ponpes wilayah Prambanan.

Kepala Dinas Kesehatan Sleman Joko Hastaryo menerangkan, untuk hasil pemeriksaan swab per hari Jumat (2/10) belum keluar. Namun hasil pemeriksaan per Kamis (1/10) kemarin ada penambahan kasus sebanyak 14. Saat ini pihak Dinkes masih melanjutkan proses tracing terhadap santri yang melakukan kontak erat yang berada di lingkungan masing-masing ponpes. **(Ira/Aha)-d**

## Trump ..... Sambungan hal 1

Dokter yang merawat Presiden Trump, Dr Sean P Conley mengatakan, Presiden Trump dan Ibu Negara memiliki keadaan yang baik dan mereka berencana untuk tinggal di rumah di Gedung Putih selama masa penyembuhan.

"Saya dan tim medis Gedung Putih akan terus berjaga-jaga dan saya menghargai dukungan yang diberikan beberapa profesional dan institusi medis terhadap di negara kita. Yakinlah, saya berharap Presiden terus menjalankan tugasnya tanpa gangguan selama pe-

mulihan, dan saya akan terus mengabari Anda tentang perkembangan masa depan," tulis Dr Conley dalam surat keterangan yang diterima wartawan, sebagaimana dikutip dari CNN oleh KR, Jumat (2/10).

Setelah mengumumkan diagnosis Presiden, Gedung Putih mengeluarkan jadwal baru untuk hari berikutnya, termasuk penggalangan dana di Washington dan kampanye di Florida.

Sebelumnya, Trump mengikuti agenda debat pemilihan presiden di Cleveland Ohio, Selasa (29/9), la berdebat de-

ngan Joe Biden yang merupakan pesaingnya di pilpres kali ini. Pada kesempatan tersebut, Trump sempat menyinggung Biden yang kerap menggunakan masker.

"Saya kira masker itu oke-oke saja. Saya pakai masker jika itu dibutuhkan. Saya tidak menggunakan masker seperti dia (Biden). Setiap kali kalian melihatnya, dia pasti pakai masker. Dia bisa berbicara dari jarak 200 kaki dan dia tampil menggunakan masker terbesar yang pernah saya lihat," ucapnya saat itu. **(R-1)-d**

## Bus Trans ..... Sambungan hal 1

Kemenhub Ahmad Yani didampingi Pjt Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti dan Ketua DPD Organda DIY V Hantoro kepada KR usai uji coba Teman Bus Trans Jogja Koridor Terminal Ngabean-Taman Kuliner Godean, Jumat (2/10).

Ahmad menyampaikan, program ini merupakan bagian layanan publik yang diberikan Pemerintah termasuk moda transportasi umum bagi wisatawan khususnya di DIY yang merupakan salah satu destinasi wisata unggulan Tanah Air. Penyelenggaraan angkutan umum saat ini harus mampu beradaptasi dengan kebiasaan baru dan memenuhi kesesuaian protokol kesehatan dampak dari adanya pandemi Covid-19.

"Tiga koridor yang dilalui Teman Bus Trans Jogja ini sementara tidak dipungut biaya alias gratis hingga akhir tahun. Se-

luruh penumpang wajib memakai masker, di pintu masuk bus disediakan mesin untuk pembayaran nontunai, hand sanitizer serta tanda silang di tempat duduk untuk jaga jarak fisik penumpang," jelasnya.

Kepala Bidang Angkutan Dishub DIY Sumariyoto menjelaskan, kehadiran Teman Bus Trans Jogja dari Kemenhub dengan 44 bus di tiga koridor baru itu terdiri Koridor Terminal Ngabean-Taman Kuliner Godean, Koridor Bandara Adisutjipto-Terminal Pakem, dan Koridor Terminal Condongcatur-UGM-Terminal Pakem. Fasilitas itu semakin melengkapi angkutan perkotaan di 25 kecamatan di DIY. Angkutan perkotaan di DIY sudah dilayani Trans Jogja sebanyak 17 jalur dengan mengoperasikan 75 bus, dari total 128 armada.

"Sesuai Surat Edaran (SE) Menteri

Perhubungan (Menhub), kapasitas penumpang maksimal 70 persen guna menjaga jarak fisik antarpemumpang. Kita usahakan seluruh armada angkutan perkotaan sudah sesuai standar operasional prosedur (SOP) dan selalu memperketat protokol kesehatan pencegahan Covid-19," jelas Sumariyoto yang akrab disapa Pak Oyot.

Direktur Utama PT Jogja Tugu Trans (JTT) Agus Andrianto menambahkan, pihaknya selaku operator sedang berproses untuk memenuhi 44 armada Teman Bus Trans Jogja sesuai adaptasi kebiasaan baru. Maksimal awal November 2020 tiga koridor sudah beroperasi semua. "Kami juga melakukan penyempotan disinfektan untuk sterilisasi kendaraan dan pengecekan kesehatan juru mudi maupun pramugara sejak di pool," kata Agus. **(Ira)-d**

## Pancasila ..... Sambungan hal 1

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), alih daya (*outsourcing*), upah, dan sebagainya.

Pemerintah berkeyakinan, pembentukan RUU Cipta Kerja dengan metode omnibus law ini mampu meningkatkan investasi di Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia. Hanya, pemerintah tidak boleh melupakan bahwasanya regulasi di Indonesia disusun dengan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di dalamnya yang merupakan dasar falsafah negara (*philosophische grondslag*). Termasuk dalam bidang ketenagakerjaan Indonesia.

Hubungan Industrial Indonesia yang merupakan ruh ketenagakerjaan di Indonesia sejatinya berjalan berlandaskan Pancasila. Ada nilai-nilai Pancasila yang terkandung dan diimplementasikan dalam regulasi ketenagakerjaan Indonesia.

Sila pertama Pancasila diimplementasikan dalam UUK tentang larangan melakukan PHK ketika peker-

ja sedang melaksanakan kewajiban agama menurut agama dan keyakinan masing-masing. Sila kedua Pancasila, sebagaimana tergambar dalam UUK bahwasanya kedudukan pekerja laki-laki dan perempuan adalah sama. Tidak ada perbedaan hak bagi pekerja laki-laki dan perempuan. Sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia diimplementasikan dalam UUK pada norma larangan PHK bagi pekerja yang memiliki perbedaan suku dengan pemberi kerja.

Selanjutnya, sila keempat Pancasila menggambarkan bahwasanya pembentukan UUK dilakukan lembaga legislatif sebagai wakil rakyat dan mengakomodasi kepentingan pihak-pihak dalam hubungan industrial, yaitu pemerintah, pemberi kerja dan pekerja. Jaminan sosial sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945 merupakan perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di Indonesia lahir dengan latar belakang untuk mampu menyelenggarakan jaminan sosial bagi seluruh

rakyat Indonesia tanpa terkecuali, termasuk pekerja.

**Founding fathers** mencitakan Pancasila sebagai penawar atas segala permasalahan bangsa. Namun hal ini tidak diimplementasikan dengan baik dalam omnibus law RUU Cipta Kerja. Dalam bidang ketenagakerjaan terdapat penurunan nilai kesejahteraan bagi pekerja. Hak pekerja bagi warga negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 mengalami penurunan dalam hal penghapusan jenis pekerja tetap menjadi pekerja kontrak untuk keseluruhan. Selain itu, alih daya bukan lagi untuk jenis pekerjaan *non-core* melainkan diperbolehkan untuk segala jenis pekerjaan.

Ketidakadilan akan terjadi manakala RUU Cipta Kerja disahkan yang memuat penghapusan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) menjadi Upah Minimum Provinsi (UMP) yang notabene besaran UMP lebih kecil dari UMK. Saat ini diberlakukannya UMK tidak menjamin pemberi kerja taat untuk melaksana-

## Micro ..... Sambungan hal 1

"Saya tidak mau terlalu beresumsi Corona sangat membahayakan, yang bisa menyebabkan masyarakat kecil takut keluar rumah untuk mencari sesuatu nasi dan kelaparan. Saya tidak mau hal tersebut terjadi. Hal yang paling penting menerapkan protokol kesehatan dalam konteks kita beradaptasi dengan Corona," ujarnya.

Sekda DIY Drs K Baskara Aji menerangkan, *micro lockdown* itu membatasi akses keluar masuk kampung untuk menghambat penyebaran Covid-19. Dengan adanya model ini, perangkat di level bawah seperti RT atau RW bisa lebih optimal dalam melakukan pengawasan terhadap warganya.

"Model *micro lockdown* yang diterapkan di DIY selaras dengan kebijakan na-

sional yang diambil pemerintah pusat. Jadi sejak awal Pemda DIY tidak pernah ada rencana melakukan PSBB. Dalam penerapan ini, selain membatasi akses keluar masuk kampung, di DIY juga tidak ada pembelajaran tatap muka bagi anak sekolah semua itu dilakukan untuk mencegah penularan," papar Sekda.

Baskara Aji mengungkapkan, selain beberapa hal di atas, sejumlah upaya terus dilakukan Pemda DIY untuk mencegah penularan Covid-19. Salah satunya bagi kantor yang tidak mungkin dilakukan jaga jarak dibuat WFH. Begitu pula untuk tempat wisata dibatasi jumlah pengunjungnya untuk menghindari terjadinya kerumunan yang bisa berpotensi memicu terjadinya penularan.

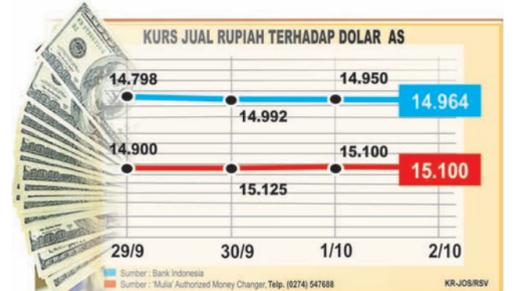
Sebetulnya sejak awal pandemi Covid-19, menurut Baskara Aji, secara tidak langsung DIY sudah menerapkan *micro lockdown*. Se-

andainya kemudian ada aturan yang mengatur secara khusus sekedar menguatkan saja. Meski begitu adanya apresiasi dari Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, hal ini menjadi motivasi agar lebih baik lagi.

Sementara itu, selain bertemu Sultan, Moeldoko juga bersilaturahmi dengan PP Muhammadiyah di Grha Suara Muhammadiyah, Jumat sore. Moeldoko ditemui Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir.

Dalam kesempatan itu, Moeldoko menyampaikan apresiasi kepada Muhammadiyah atas segala langkah penanganan Covid-19 yang dilakukan pencegahan dengan sangat masif, bergerak sangat luar biasa dan terorganisir. Bahkan Muhammadiyah dengan 89 rumah sakit yang ikut terlibat secara aktif dalam penanganan Covid-19, beserta seluruh tenaga kesehatannya.

**(Dev/Ria/Fsy)-f**



## Prakiraan Cuaca Sabtu, 3 Oktober 2020

Lokasi	Pagi	Siang	Cuaca Malam	Dini Hari	Suhu C	Kelembaban
Bantul					19-31	50-90
Sleman					18-31	55-95
Wates					19-31	50-90
Wonosari					19-32	50-90
Yogyakarta					19-31	50-90
Cerah					19-31	50-90

*(Penulis adalah Pengajar Hukum Ketenagakerjaan Fakultas Hukum UII)-d*